Kalianda Halok Gagas, Volume 7, No 2, Oktober 2024
ISSN 2776-1355 (Online)
*Received : October, 15, 2024* *https://ojs.stiemkalianda.ac.id*
*Revised : October, 20, 2024*
*Available online : November, 1,2024*

# EKONOMI POLITIK KETAHANAN PANGAN : KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA KORPORASI DAN PETANI LOKAL

Muhammad Rifqy Fauzan[1] Aulia Dwi Cahyani[2] Anas Malik[3]
[1] Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung,
[2] Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung,
[3] Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung

Email : rifqyfauzan.mrf1704@gmail.com

***ABSTRACT :***
*The political economy of food security encompasses a variety of dynamics between food production, distribution and consumption that involve various actors with often conflicting interests. Conflicts of interest between large corporations and local agriculture are one of the main issues in the global food system. Large corporations that control agricultural technology, inputs such as seeds and pesticides as well as distribution markets often prioritize short-term profits and hold the sustainability and welfare of small farmers while local farmers who rely on traditional defense methods often face difficulties in accessing wet technology and policies that favor corporations creating uneven food security and exacerbating social and economic inequality. The solution to this problem requires policies that can balance the interests between the two rules through regulations that support local farmers and reduce the dominance of large corporations. This research analyzes the impact of political economy on resilience by focusing on the concept of interests that occur and offers policy recommendations to create a more equitable and sustainable hand system.*
***Keywords: Political economy, Food Security, Corporations, Local farmers***

**ABSTRAK :**
Ekonomi politik ketahanan pangan mencakup berbagai dinamika antara produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang seringkali bertentangan. Konflik kepentingan antara korporasi besar dan pertanian lokal menjadi salah satu isu utama dalam sistem pangan global. Korporasi besar yang menguasai teknologi pertanian, input seperti benih dan pestisida serta pasar distribusi sering kali memprioritaskan keuntungan jangka pendek dan mengadakan keberlanjutan serta kesejahteraan petani kecil selain itu petani lokal yang bergantung pada metode pertahanan tradisional seringkali menghadapi kesulitan akses terhadap teknologi basah dan kebijakan yang lebih menguntungkan korporasi menciptakan ketahanan pangan yang tidak merata serta memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Solusi dalam mengatasi permasalahan ini dibutuhkan kebijakan yang dapat menyeimbangkan

kepentingan antara kedua aturan tersebut melalui regulasi yang mendukung petani lokal dan mengurangi dominasi korporasi besar. Penelitian ini menganalisis dampak ekonomi politik terhadap ketahanan dengan fokus pada konsep kepentingan yang terjadi serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan sistem tangan yang lebih adil dan berkelanjutan.
**Kata kunci : Ekonomi politik, Ketahanan Pangan, Korporasi, Petani local**

## PENDAHULUAN

Pangan dan gizi merupakan hak setiap orang yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Kewajiban ini tidak hanya termaktub pada Konstitusi, tetapi juga amanat dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya juga mengamanatkan bahwa setiap negara perlu memitigasi kelaparan dengan mengambil tindakan baik secara individu maupun melalui kerja sama internasional untuk meningkatkan metode produksi, konservasi, dan distribusi pangan dengan sepenuhnya menggunakan pengetahuan teknis dan ilmiah untuk membantu tercapainya pengembangan dan penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien; dan memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil untuk memenuhi kewajiban mewujudkan hak atas pangan dan gizi bagi masyarakat (Pasal 11 ayat (2) ICESCR, 1966). Dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pemaknaan terhadap hak atas pangan dan gizi dapat ditemui misalnya pada pasal 28A: hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; dan pasal 28B ayat (2): hak anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya. Pengaturan lebih teknis mengenai pemenuhan pangan oleh negara diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Keberadaan kerangka hukum atas pangan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia lebih aktif dan responsif dalam mewujudkan hak atas pangan dan gizi.

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama dalam membangun ekonomi dan sosial mengingat perannya yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga dalam konteks Global ketahanan pangan bukan hanya terkait dengan produksi pangan yang melimpah tetapi juga dengan distribusi yang adil dan akses yang merata (Sari *et al.*, 2024).

Konflik kepentingan ini seringkali terjadi karena korporasi besar yang menguasai sebagian teknologi pertanian, input seperti benih dan pestisida serta pasar distribusi yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan Selain itu petani lokal yang tergantung pada metode pertanian tradisional dan terbatasnya akses ke sumber daya seringkali kesulitan untuk bersaing dengan kekuatan pasar yang dikuasai oleh korporasi Sehingga dalam hal ini korporasi cenderung mengutamakan profitabilitas jangka pendek sementara petani lokal lebih fokus pada keberlanjutan produksi jangka panjang. Dominasi korporasi besar dalam sektor pangan telah

*Received : October, 15, 2024*
*Revised : October, 20, 2024*
*Available online : November, 1,2024*

memperburuk ketimpangan antara negara maju dan berkembang negara-negara maju dengan akses ke teknologi canggih dan sumber daya alamnya lebih besar mampu menguasai pasar pangan Global sebaliknya negara-negara berkembang seringkali hanya menjadi konsumen bahan baku pangan yang harganya ditentukan oleh perusahaan (Rasman *et al.*, 2023).

Meskipun pertahanan pangan adalah masalah yang sangat krusial banyak kebijakan yang ada justru memperburuk ketimpangan, ketidakadilan dan ketergantungan pada sistem pada Global kondisi ini akan membutuhkan perubahan yang lebih mendalam baik dalam kebijakan pertanian, perdagangan maupun pengelolaan sumber daya alam. Agar ketahanan pangan yang dicapai secara berkelanjutan penting untuk menciptakan sistem pangan yang lebih adil dimana kepentingan lokal dalam koperasi besar dapat diakomodasi dalam kerangka kebijakan yang lebih eksklusif. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetik kepentingan antara korporasi besar dan petani bekas dalam konteks ekonomi politik ketahanan pangan dan juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari ketimpangan dalam sistem pangan Global serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan koperasi dan petani lokal. Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan sangat pentig agar tidak memberikan keuntungan di salah satu pihak (Wibowo, 2020).

## KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Ekonomi Politik

Ekonomi politik addalah suatu disiplin ilmu politik dimana pemahamannya dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap ahli, baik itu oleh ahli politik maupun ahli ekonomi. Seperti menurut Marx yang dijelaskan dalam buku karya Barry dan Donald Wittman the oxford handbook of political economy ekonomi politik merupakan kepemilikikan alat produksi yang bergantungan pada proses sejarah. Sedangkan menurut Mochtar Mas'oed, ekonomi politik merupakan studi yang mengaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan studi ekonomi politik terdapat beberapa sudut pandang dan konsep yang digunakan, salah satunya adalah liberalism, yang mana perspektif ini menekankan pada kebebasan yang merupakan inti dan syarat utama dalam perkembangan manusia secara maksimal. John Locke yang merupakan tokoh utama dalam liberalism mengemukaan bahwa kebebasan harus menjadi prinsip fundamental dalam kehidupan politik. Menurut John Locke kebebasan diartikan sebagai ketiadaan campur tangan eksternal dalam aktivitas individu. Beliau juga menyatakan bahwa manusia memiliki tiga hak dasar yang tidak dapat dilanggar, yaitu hak hidup, ha katas kebebasan

dan ha katas kepemilikan. Perspektif liberalism menawarkan dua konsep utama untuk melakukan analisis terhada fenomena ekonomi politik yang pertama adalah asumsi rasional yang mencakup teori permainan, teori pilihan public dan teori pilihan rasional. Kedua adalah ekonomi politik internasional yang mengkaji bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik saling mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan pemerintah (Suleman *et al.*, 2021).

**2.2 Ketahanan Pangan dalam Perspektif Ekonomi Politik**

*Ke*butuhan akan pangan merupakan hal yang krusial bagi kehidupan manusia tidak hanya untuk mencegah diri dari rasa lapar kebutuhan akan pangan yang bergizi dibutuhkan untuk meningkatkan performa tubuh manusia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan, produktivitas dan perkembangan. Tanpa adanya akses pangan yang berkualitas dan mudah untuk diperoleh dapat membuat terganggunya kesejahteraan hidup manusia sehingga menjaga ketahanan dan ketentangan yang berkelanjutan merupakan fokus bersama negara-negara di dunia pada saat ini. Selain itu pemenuhan kebutuhan pangan juga menjadi hak setiap rakyat Indonesia sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012 yang menyebabkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang memadai aman serta berkualitas dan juga memiliki nilai gizi yang seimbang dimana Hal ini berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah hingga ke individu secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal tersebut harus dijamin kuantitas, kualitas dan di mana menjadi fokus karena dengan adanya ketahanan akan pangan di suatu negara dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonominya karena dengan nutrisi pangan yang baik membuat sumber daya manusia di negara tersebut juga lebih baik dari sisi produktivitasnya sehingga berdampak pada perekonomiannya.

Indeks ketahanan pangan merupakan suatu nilai komposit mengenai kondisi ketantangan suatu wilayah yang dihitung dengan beberapa indikator variabel di Indonesia yang mana pengukuran indeks ketahanan yang dilakukan oleh badan pangan nasional seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya terdapat empat pilar ketahanan pangan yakni ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas (Eliezer, 2024).

**2.3 Teori Konflik Kepentingan**

Ketahanan pangan tidak hanya tentang ketersediaan pangan tetapi juga menyangkut aksisibilitas, keterjangkauan dan keadilan distribusi di mana keseimbangan ini akan diperburuk oleh food waste food yang lebih tinggi di negara maju dibandingkan negara berkembang yang mana ketimpangan ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang sistemik antara kelompok yang memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya pangan global dan mereka yang tidak memiliki akses tersebut. Sementara itu konflik kepentingan dalam ketahanan pangan mencakup keterlibatan agen langsung seperti petani dan juga konsumen serta agen tidak langsung seperti

*Received : October, 15, 2024*
*Revised : October, 20, 2024*
*Available online : November, 1,2024*

industri benih, agrokimia dan peritel dan akhir ini secara tidak langsung saling memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan, harga dan produksi pangan Global yang seringkali mengabaikan kepentingan petani lokal.

Kebijakan nasional seringkali terpecah antara pendukung petani lokal dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga terjangkau contohnya pada kebijakan impor pangan untuk stabilisasi harga domestik yang seringkali merugikan petani lokal karena harga jual yang rendah tidak dapat menutupi biaya produksi yang tinggi. Sementara itu institusi seperti FAO, Bank Dunia dan IMF berperan penting dalam membentuk kebijakan pangan melalui pinjaman dan program Global seperti Structural Adjustment Programs. Program ini seringkali menciptakan konflik kepentingan karena meskipun menawarkan solusi keuangan mereka menempatkan negara berkembang dalam ketergantungan yang memperburuk kesejahteraan pangan lokal sehingga konflik kepentingan dalam pertahanan pangan dapat diatasi melalui beberapa pendekatan berbasis komputer yang memberdayakan petani lokal dimana teknologi dan praktik tradisional dapat membantu menciptakan ketahanan pangan yang lebih ciri dan berkelanjutan serta mengurangi pengaruh organ Global yang seringkali mendominasi sistem pangan (Lestari, 2024).

### 2.4 Kapitalisme Global dan Korporatisasi Pertanian

Kapitalisme Global memungkinkan perusahaan besar untuk memonopoli sektor pangan dari benih hingga agroindustri. Sebagai contoh 6 perusahaan sebesar seperti Bayer-Monsanto dan Dow - Dupot menguasai 94% pasar pestisida global dan 75% penelitian tanaman swasta yang memperburuk ketergantungan negara berkembang pada input pertanian modern. Negara berkembang Seringkali hanya menjadi pemasok bahan baku murah bagi perusahaan global Sehingga dalam proses ini mereka membeli benih, pestisida dan alat produksi dengan harga tinggi sementara keuntungan besar dinikmati oleh perusahaan di negara maju yang mana situasi ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang merugikan petani lokal.

Revolusi hijau membawa dampak signifikan pada kapitalisasi sektor pertanian meskipun berhasil meningkatkan produksi pangan revolusi ini juga menghapus praktik pertanian tradisional dan menciptakan ketergantungan pada teknologi modern seperti pupuk kimia dan pestisida yang dikuasai perusahaan besar. Program seperti food estate di Indonesia adalah contoh corporatisasi pertanian yang mana melibatkan perusahaan besar dalam pengelolaan lahan dalam kebijakan ini mengadakan hak masyarakat lokal dan kearifan tradisional. Food estate mencerminkan bagaimana kapitalisme Global memperkuat kontrol perusahaan atas sumber daya pangan. Kapitalisme Global

juga didorong oleh merger perusahaan besar yang bertujuan memperluas dominasi pasar contohnya merger antara Heins dan Kraft food yang menciptakan perusahaan makanan besar dan mengontrol distribusi secara global dimana dominasi ini mempengaruhi harga pangan dan menghalangi inovasi lokal serta memperburuk ketergantungan negara berkembang (Lestari, 2024).

**2.5 Keadilan Distribusi dalam Sistem Ekonomi Pangan**

Keadilan distribusi dalam sistem ekonomi pangan mengacu pada penyebaran yang adil dan merata atas akses terhadap sumber daya bangunan baik secara lokal maupun Global hal ini melibatkan kemampuan semua lapisan masyarakat untuk memperoleh makanan yang cukup, sehat dan terjangkau tanpa diskriminasi. Keadilan distribusi menjadi fundamental karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang jika tidak terpenuhi secara merata dapat menyebabkan kelaparan, malnutrisi dan ketimpangan sosial ekonomi. Sistem distribusi pangan Global saat ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan di mana negara maju cenderung mengalami surplus pangan dengan tingkat food waste yang tinggi Sementara negara berkembang menghadapi kekurangan pangan akut contohnya pada rata-rata food waste perkapita di Eropa dan Amerika Utara yang mencapai 95 sampai 115 kg per tahun dibandingkan dengan hanya 6-11 kg di Asia Selatan dan sup Sahara Afrika yang mana ketimpangan ini mencerminkan distribusi yang tidak adil akibat dominasi negara maju dan sistem pangan global.

Struktur ekonomi global yang didominasi oleh kapitalisme dan Perdagangan Bebas seringkali mempengaruhi distribusi pangan secara tidak merata di mana negara berkembang seringkali dijadikan sebagai penyedia bahan mentah murah untuk negara maju sementara produk olahan yang bernilai tinggi dijual kembali dengan harga yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin dan pola ini tidak hanya menciptakan ketergantungan ekonomi tetapi juga menghambat upaya untuk menciptakan distribusi yang lebih adil.

Kebiajakn perdagangan Global juga mempengaruhi distribusi pangan seperti tarif ekspor impor yang tidak adil, subsidi agrikultur di negara maju, serta monopoli perusahaan multinasional mengakibatkan negara berkembang kehilangan daya saing dan contohnya seperti subsidi pertanyaan di negara maju memungkinkan produk mereka dijual lebih murah di pasar internasional sehingga menghasilkan pertanian lokal di negara berkembang yang tidak mampu bersaing. Korporatisasi sektor pangan yang didorong oleh perusahaan besar mengkonsentrasikan kendali atas produksi distribusi dan pemasaran pangan dalam segelintir entitas. Praktik ini menyebabkan penurunan kemandirian lokal dalam mengelola sumber daya pangan dan memfasilitasi distribusi yang berpihak pada kelompok ekonomi atas dalam banyak kasusnya Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang tidak seimbang dengan dampak buruk yang diterima petani kecil dan konsumen miskin (Syukron dan Adinugraha, 2024).

Kalianda Halok Gagas, Volume 7, No 2, Oktober 2024
ISSN 2776-1355 (Online)
*Received : October, 15, 2024*
*Revised : October, 20, 2024*
*Available online : November, 1,2024*
*https://ojs.stiemkalianda.ac.id*

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasus untuk menganalisis konflik kepentingan antara korporasi dan petani lokal dalam ketahanan pangan. Data yang dikumpulkan melalui studi literature mendalam pemerintah serta analisis dokumen kebijakan terkait pertanian dan pangan. Observasi lapangan juga dilakukan di beberapa daerah pertanian untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang dinamika yang terjadi sehingga data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terburuk ketimpangan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menciptakan keseimbangan antara kedua faktor tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai dampak ekonomi politik terhadap kedatangan pangan serta memberikan wawasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan mendukung petani lokal dalam menghadapi dominasi korporasi besar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pemetaan Aktor dalam Konflik Ketahanan Pangan

Pemetaan aktor dalam konflik ketahanan pangan merupakan proses mengidentifikasi dan memahami peran berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pangan baik secara langsung maupun tidak langsung di mana aktor-aktor ini memiliki kepentingan, pengaruh dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam mengelola produksi, distribusi hingga akses pangan. Pemahaman terhadap pemetaan ini penting untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengurangi konflik dan memastikan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Petani adalah faktor utama dalam produksi pangan mereka sering menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan pangan seperti perubahan harga input atau regulasi pasar Selain itu Konsumen juga menjadi aktor penting yang mempengaruhi permintaan pangan melalui preferensi konsumsi dan daya beli sehingga aku tidak seimbangan antara kebutuhan petani dan konsumen dapat menjadi sumber konflik terutama jika ada distorsi harga atau gangguan dalam rantai pasok.

Perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor benih, agrokemia dan teknologi pertanian memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah sistem tangan global dan mereka sering kali memonopoli pasar input pertanian seperti bendera rekayasa genetik atau pestisida yang menciptakan ketergantungan petani sehingga dominasi mereka sering mengabaikan kebutuhan lokal dan menyebabkan konflik antara produsen kecil dan entitas global. Pemerintah berperan sebagai regulator kebijakan pangan nasional namun dalam beberapa kasus kebijakan yang diambil dapat menciptakan konflik seperti ketergantungan pada yang pertama yang merugikan petani lokal

dan Selain itu kebijakan subsidi di negara maju yang mendeskripsi harga tangan Global memperburuk konflik dengan petani lokal di negara berkembang yang tidak mampu bersaing secara adil.

Institusi global dan dampaknya Seperti contohnya FAO, Bank Indonesia dan juga IMF dapat mempengaruhi ketahanan pangan melalui pinjaman, regulasi perdagangan dan program pembangunan. Namun intervensi mereka sering mengadakan konteks Global yang memaksakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan negara berkembang sehingga memiliki konflik kepentingan antara faktor lokal dan internasional terutama dalam hal ketergantungan pada sistem pangan global. Kelopok advokasi pangan dan aktivitas lingkungan juga merupakan faktor penting dalam kelompok konflik tekanan pangan mereka seringkali bertindak sebagai pengawas yang memperjuangkan keadilan distribusi pangan dan berkelanjutan lingkungan namun pendekatan mereka kadang berkonflik dengan keputungan atau ekonomi seperti perusahaan besar atau pemerintah Terutama ketika kebijakan yang diusulkan menentang investasi besar di sektor pangan (Pramestisari, 2020).

**3.2 Dampak Monopoli Korporasi pada Ketahanan Pangan Lokal**

Monopoli korporasi dalam sektor pangan terutama oleh perusahaan multinasional yang menguasai benih, pupuk, pestisida, dan teknologi pertanian menciptakan ketergantungan petani lokal pada input pertanian yang mahal sehingga petani kecil tidak memiliki pilihan bahan membeli produk dari perusahaan-perusahaan besar dan hal ini akan mengurangi kemampuan petani untuk menggunakan benih lokal atau metode tradisional yang menghasilkan keberlanjutan sistem pangan lokal. Salah satu dampak signifikan dari monopoli korporasi adalah penurunan keanekaragaman hayati di sektor bahan lokal dengan penggunaan bendera rekayasa genetik yang diproduksi secara massal oleh perusahaan besar menghentikan varietas benih lokal yang lebih adatif terhadap kondisi geografis tertentu di Indonesia misalnya sejak tahun 1970-an sekitar 9000 varietas pada Loka telah hilang karena dominasi demi industri hal ini juga melemahkan ketahanan pangan lokal Terutama ketika varietas komersial gagal beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Ketergantungan pada pertanian dari perusahaan besar membuat sistem pengelola lebih rentan terhadap gangguan di mana ketika distribusi benih, pupuk, dan pestisida terganggu akibat konflik geopolitik atau krisis Global petani lokal tidak memiliki sumber daya alternatif untuk mempertahankan produksi mereka yang dapat mengarah pada krisis pangan lokal yang parah. Monopoli korporasi seringkali memperparah ketimpangan dalam distribusi pangan lokal yang mana produk pangan dihasilkan oleh Petani sering dijual kepada perusahaan besar dengan harga rendah sementara produk olahan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi akibatnya masyarakat lokal terutama daerah pedesaan seringkali tidak mampu membeli produk pangan yang mereka hasilkan sendiri (Simamora *et al.*, 2021).

ISSN 2776-1355 (Online)
*Received : October, 15, 2024*
*Revised : October, 20, 2024*
*Available online : November, 1,2024*
*https://ojs.stiemkalianda.ac.id*

### 3.3 Peran Pemerintah dalam Menyeimbangkan Kepentingan Korporasi dan Petani

Pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan regulasi yang adil untuk menyeimbangkan kepentingan koperasi dan petani di mana regulasi ini dapat mencakup batasan terhadap praktik monopoli korporasi, perlindungan hak petani atas benih, serta insentif untuk mendukung petani kecil contohnya dalam undang-undang yang melarang kontra eksklusif antara koperasi dan petani dapat mencegah ketergantungan petani pada input dari perusahaan besar dan regulasi semacam ini menghasilkan bahwa korporasi tidak mendominasi seluruh Rantai nilai pertanian. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada petani lokal untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing mereka terhadap korporasi dan subsidi ini dapat mencakup bantuan dalam bentuk pupuk, benih lokal atau program pelatihan teknologi pertanian Selain itu pemerintah juga dapat menyediakan kredit mikro dengan bunga rendah untuk membantu petani berinvestasi dalam praktik pertanian berkelanjutan tanpa harus bergantung pada perusahaan besar.

Salah satu cara pemerintah dapat mendukung petani adalah dengan mempromosikan diversifikasi produk pangan lokal dan pemerintah dapat menciptakan pasar bagi produk-produk lokal melalui kebijakan pembelian langsung seperti memasukkan hasil pertanian lokal ke dalam program bantuan pangan dan cara ini dapat membuat petani mendapatkan akses pasar yang stabil dan masyarakat lokal mendapat manfaat dari produk yang lebih beragam dan berkualitas. Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan harga minimum untuk hasil pertanian guna melindungi pertanian dari kerugian akibat fluktuasi pasar dan mengatur kan harga pangan di tingkat Konsumen juga dapat dilakukan untuk mencegah korporasi menaikkan harga secara berlebihan sehingga kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat agar koperasi tidak memanfaatkan situasi dengan monopoli distribusi dan penjualan pangan.

Pemerintah juga dapat membangun kemitraan dengan korporasi untuk menciptakan energi yang bermanfaat bagi petani kecil contohnya pemerintah dapat menjembatani hubungan antara petani dan koperasi melalui koperasi petani yang kuat dengan model ini korporasi bertindak sebagai penengah untuk memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang adil dan akses kepada tanpa harus tunduk pada monopoli koperasi. Pemerintah dapat berperan aktif dalam membangun infrastruktur pertanian seperti irigasi, Jalan dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung efisiensi produksi petani Selain itu investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan lokal dapat mengurangi ketergantungan pada teknologi impor yang sering dikendalikan oleh korporasi sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas tanpa harus bergantung pada input perusahaan besar (Lestari *et al.*, 2019).

### 3.4 Strategi Korporasi dalam Menguasai Sumber Daya Pangan

Salah satu strategi utama korporasi dalam menguasai sumber daya pangan adalah dengan mendominasi pasar input pertanian. Korporasi seringkali menggunakan merger dan akuisisi untuk memperluas pengaruhnya di sektor pangan sebagai contoh dalam perusahaan-perusahaan besar menciptakan beberapa produk yang mana menghasilkan salah satu strategi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan besar mengkonsolidasi kendali mereka atas rantai pasok pangan mulai dari produksi hingga distribusi. Korporasi juga menguasai infrastruktur pasca panen seperti fasilitas penyimpanan, pengolahan dan distribusi serta hal ini memberikan mereka kendala penuh terhadap harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar petani kecil seringkali bergantung pada infrastruktur ini untuk memasarkan hasil panen mereka yang memaksa mereka menjual dengan harga rendah kepada korporasi yang kemudian menjualnya dengan margin keuntungan yang besar.

Korporasi besar sering melodi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dominasi mereka dan hal ini dapat berupa subsidi bagi perusahaan multinasional, pengurangan tarif impor atau aturan yang menguntungkan bagi koperasi dalam perdagangan internasional dimana untuk memperluas penguasaan mereka korporasi menggunakan strategi pemasaran Global yang mempromosikan produk mereka sebagai solusi terbaik untuk kebutuhan pangan Contohnya seperti produk-produk hasil rekayasa genetika yang sering dipasarkan sebagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas meskipun seringkali mengadakan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati lokal tetapi kampanye ini juga membangun citra populasi sebagai Mitra penting dalam ketahanan pangan Global padahal praktik mereka justru sering memperburuk ketimpangan.

Korporasi besar mendominasi pasar distribusi dengan mengontrol lantai masuk secara global perusahaan Contohnya seperti Walmart dan nestlé memiliki jaringan distribusi yang mencakup berbagai negara yang memungkinkan mereka menentukan harga pasar dan dominasi ini memberikan keuntungan besar bagi operasi tetapi merugikan produsen kecil dan konsumen karena mereka tidak memiliki daya tawar yang cukup dan pada era digitalisasi korporasi semakin menggunakan teknologi dan data untuk menguasai sumber daya pangan dimana penggunaan platform digital untuk memantau hasil panen, tanah dan cuaca memberikan mereka keunggulan strategis dalam mengontrol produktivitas pertanian dan data ini juga digunakan untuk menciptakan model bisnis yang mengunci Petani dalam ekosistem perusahaan tersebut penyedia perangkat lunak manajemen pertanian yang banyak kompatibel dengan produk perusahaan tertentu (Ismail dan Djana, 2021).

**3.5 Ketimpangan Akses terhadap Teknologi Pertanian**

Ketimpangan akses terhadap teknologi pertanian mengacu pada disparitas antara petani yang memiliki akses terhadap teknologi modern seperti alat mesin, bibit unggul dan sistem irigasi yang canggih dengan mereka yang tidak memilikinya sehingga menciptakan ketimpangan yang

ISSN 2776-1355 (Online)
*Received : October, 15, 2024*
*Revised : October, 20, 2024*
*Available online : November, 1,2024*
*https://ojs.stiemkalianda.ac.id*

seringkali terjadi antara negara maju dan negara berkembang dan antara petani besar dan petani kecil di dalam suatu negara. Teknologi modern yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas justru memperburuk ketimpangan di sektor pertanian. Biaya tinggi untuk mendapatkan teknologi pertanian menjadi hambatan utama bagi petani kecil di negara berkembang sebagian besar contohnya adalah alat modern seperti traktor, sistem irigasi presisi atau pupuk khusus yang dikembangkan oleh perusahaan multinasional yang menetapkan harga tinggi dan hal ini membuat petani kecil tidak mampu membeli atau memanfaatkan teknologi tersebut sehingga mereka Tertinggal dalam hal produktivitas dibandingkan dengan petani besar atau korporasi.

Negara maju dengan dukungan finansial dan infrastruktur yang lebih baik mampu mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian canggih seperti Drone untuk memantau lahan atau kondisi kata motivasi sebaliknya negara berkembang seringkali hanya memiliki akses terhadap teknologi dasar yang Sudah usang dan hal ini menciptakan kesenjangan global dalam produktivitas dan efisiensi pertanian dimana negara berkembang sering menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai rendah. Ketimpangan akses terhadap teknologi pertanyaan yang terdapat langsung pada kedatangan lokal yang mana petani tidak memiliki hasil teknologi modern cenderung memiliki hasil panen yang lebih rendah, biaya produksi yang lebih tinggi, dan lebih rentan terhadap perubahan iklim atau gangguan eksternal sehingga ketidakseimbangan ini membuat daerah-daerah dengan teknologi rendah tergantung pada impor barang yang melemahkan kemandirian pangan mereka (Seba *et al.*, 2024).

**3.6 Implikasi Sosial dan Lingkungan dari Konflik Ketahanan Pangan**

Konflik ketahanan pangan memperburuk ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin baik di tingkat lokal maupun global dan koperasi besar serta petani skala besar yang memiliki akses keteknologi dan pasar global cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar sementara petani kecil sering terjebak dalam lingkaran kemiskinan sehingga ketimpangan ini menciptakan polarisasi sosial yang semakin dalam dengan kelompok miskin menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Beberapa kasus konflik ketahanan pangan menyebabkan marginalisasi komunitas lokal terutama petani kecil dan masyarakat adat yang mana proyek korporasi besar seperti food Estate atau perkebunan besar seringkali mengabaikan hak tanah komunitas lokal sehingga mereka kehilangan proses sumber daya yang menjadi tumpuan hidup mereka dan hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan tetapi juga merusak identitas budaya yang berakar pada grafik tradisional.

Implikasi sosial dan lingkungan dari konflik ketahanan pangan menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam mengelola sistem tanam yang mana pemerintah serta komunitas lokal

dan korporasi harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang berorganisasi pada keberadaan sosial dan norma lainnya dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, perlindungan hak komunitas lokal, dan distribusi pangan yang lebih adil adalah langkah untuk mengatasi dampak negatif konflik ketahanan pangan (Anastasia *et al.*, 2024).

**3.7 Rekomendasi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkeadilan**

Ketahanan pangan yang berkualitas memerlukan sistem distribusi yang adil dan inklusif peran pemerintah harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terutama di daerah terpencil memiliki akses terhadap bangsa yang cukup bergizi dan terjangkau dan Hal ini dilakukan melalui pembangunan mikrastruktur distribusi seperti jalan, gudang penyimpanan dan pasar lokal selain Hambatan perdagangan yang tidak adil dan penetapan kebijakan harga pangan yang wajar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan. Petani lokal memegang peran penting dalam pertahanan pangan dan pemerintah serta lembaga terkait harus menyediakan pelatihan, akses teknologi modern serta hubungan finansial seperti subsidi dan kredit mikro melalui penguatan kapasitas petani kecil mereka dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada korporasi besar dan program koperasi petani juga dapat membantu petani kecil bersatu untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik dan daya tawar yang lebih tinggi.

Pertanian berkelanjutan harus menjadi inti dari strategi ketahanan pangan. Praktik praktik seperti Penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman dan pelestarian benih lokal dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Pemerintah perlu mendorong penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang mendukung produk pertanian berkelanjutan Selain itu insentif dapat diberikan kepada petani minimal pasti mengadopsi metode pertanian yang berkelanjutan. Perlindungan komunitas rentan pemerintah harus memperkuat program perlindungan sosial seperti bantuan pangan langsung, subsidi makanan dan program gizi untuk ibu hamil serta anak-anak yang mana Upaya ini memastikan bahwa kelompok yang paling rentan terhadap perlawanan pangan tetap memiliki akses ke kebutuhan dasar mereka sistem ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan.

Salah satu tantangan besar dalam ketahanan pangan adalah tingginya jumlah food waste terutama di negara maju sehingga pemerintah dan masyarakat perlu mengadopsi kebijakan dan praktik untuk mengurangi pemborosan makanan seperti contohnya saja dalam publik, sistem melalui pengurangan food waste ketersediaan pangan dapat ditempatkan tanpa harus meningkatkan produksi secara signifikan. ketahanan pangan yang berkualitas memerlukan kolaborasi antara pemerintah sektor swasta, kecil atau komunitas lokal yang mana Pemerintah perlu mengadakan forum dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan tangan inklusif serta partisipasi komunitas lokal sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka melalui pendekatan

*Received : October, 15, 2024*
*Revised : October, 20, 2024*
*Available online : November, 1,2024*

multistakeholder ini ketahanan pangan dapat dicapai secara holistik dan berkelanjutan (Wuli, 2023).

## KESIMPULAN

Konflik kepentingan antara korporasi besar dan bertahan lokal dalam ekonomi politik ketahanan pangan menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam sistem pangan global. Korporasi besar yang mendominasi pasar benih, pestisida dan teknologi pertanian seringkali mengabaikan keberlanjutan kerja dan kesejahteraan petani kecil. Ketergantungan petani lokal pada input dari korporasi serta kesulitan mereka dalam mengakses pasar atau teknologi modern menyebabkan penurunan produktivitas dan ketahanan pangan Selain itu kebijakan yang lebih menguntungkan korporasi seperti subsidi yang tidak proporsional dan tarif impor yang tidak adil menurut kondisi ekonomi petani kecil ketimpangan ini tidak hanya merugikan petani lokal tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan nasional dan global karena mengurangi kemandirian pangan dan meningkatkan kerentanannya terhadap perubahan eksternal.

## REFERENSI

Anastasia, S., Nurohman, R., Zaidan, D. T. N., & Mubarok, A. (2024). Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *4*(2), 545-553.

Eliezer, W. R., & Timur, J. (2022). *Pengaruh Aksesibilitas dan Kesehatan Masyarakat terhadap Ketahanan Pangan di Papua dan Papua Barat Tahun 2022 ( The Role of Accessibility And Public Health on Food Security in Papua and West Papua 2022 )*. *2022*, 203–210.

Ismail, A., & Djana, A. (2021). Globalisasi TNCs Argibisnis dan Dominasi atas Pangan. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh)*, *1*(2), 1–6. https://doi.org/10.52046/jssh.v1i2.871

Lestari, E. I., Roisah, K., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman. *Jurnal Notarius*, *12*(2), 972–985.

Lestari, I. (2024). *Keterkaitan pangan dan politik-ekonomi global*. *Gender, Human Development and Economics*. *1*(2), 0–11.

M Haqqi An Nazili Lubis, Ahmad Kholil, A. W. N. (2023). Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(2), 124–136.

Pramestisari, N. A. S. (2020). Dunia Dalam Cengkeraman Invisible Hand (Telaah Kritis Atas

Globalisasi Melalui Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate). *Asketik*, *4*(2), 163–174. https://doi.org/10.30762/ask.v4i2.2305

Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, *1*(1), 36–68. https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183.

Seba, T. P. K., Memah, M. Y., & Benu, N. M. (2024). Ketimpangan Sosial Pada Sumberdaya Pertanian di Desa Sawangan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan)*, *6*(4), 251-258.

Simamora, B., Lubis, K., & Arini, H. (2021). Analisis Asumsi-Asumsi pada Program Food Estate di Papua. *Perspektif*, *10*(2), 293–300. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4267

Suleman, N. H., Parenrengi, F., & Oelfa, T. K. (2021). Ekonomi Politik Indonesia Saat Ini, Kebijakan, Penerapan Serta Tanggapan Masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, *1*(1), 28. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i1.1509

Sari, K., Lokal, P., Mamijuk, U., Tengah, S., Hukum, F., & Mada, U. G. (2024). *Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate : Ancaman Otonomi Petani dan*. *6*(436).

Wibowo, E. T. (2020). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, *26*(2), 204. https://doi.org/10.22146/jkn.57285

Wuli, R. N. (2023). Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan. *Jurnal Pertanian Unggul*, *2*(1), 1–15.